

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA KECAMATAN SLOGOHIMO**

II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Biodata Elektronik PNS (database). Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS.	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan.	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS, dll	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan.	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Terbatas	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
5	Daftar Nilai DP3/ Sasaran Kinerja Pegawai PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Data rekam medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No.269/ Menkes/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS Dapat merugikan PNS Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
7	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana.	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 ---> Pasal 17 huruf j UU KIP	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas	Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia --->: lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan pemerikaan/ pengawasan)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas, kecuali setelah selesai di pemeriksaan/ pengawasan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
9	Dokumen Penawaran Kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpress 70 Tahun 2012 dan diubah lagi dengan Perpres No. 4 Tahun 2015	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian

Slogohimo, 3 Pebruari 2020

CAMAT SLOGOHIMO

Drs.KHAMID WIJAYA, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19720503 199303 1 004